

Sosialisasi Peran BUMDes sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa

Fitria^{1*}, Eko Nuriyatman², Syamsir³, Lili Naili Hidayah⁴, Latifah Amir⁵

Fakultas Hukum, Universitas Jambi

E-mail: fitria@unja.ac.id

* Corresponding Author



<https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.6109>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 29 Maret 2026

Revised: 2 April 2026

Accepted: 15 April 2026

Kata Kunci:

Pemberdayaan Ekonomi Desa,
Partisipasi Masyarakat,
Tata Kelola Desa,
Pengembangan Potensi Lokal.

Keywords:

Village Economic
Empowerment,
Community Participation;
Governance;
Local Potential Development



ABSTRACT

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas masyarakat dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi desa di Desa Tangkit Baru, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif dan persuasif melalui model *attention, interest, desire, action* yang dilaksanakan melalui tahapan survei awal, sosialisasi, diskusi partisipatif, implementasi program, pendampingan, dan evaluasi. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebelum pelaksanaan program, Badan Usaha Milik Desa belum berjalan optimal akibat keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya kapasitas manajerial, rendahnya pemahaman regulasi, serta minimnya pemanfaatan potensi lokal dan teknologi. Setelah kegiatan dilaksanakan, terjadi peningkatan pemahaman hukum masyarakat, kapasitas pengelola dalam manajemen usaha, serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Muncul inovasi usaha berbasis potensi lokal dan peningkatan kapasitas digital dalam pemasaran produk desa. Secara keseluruhan, kegiatan ini membuktikan bahwa sosialisasi dan pendampingan yang dilakukan secara terintegrasi efektif dalam memperkuat kapasitas kelembagaan Badan Usaha Milik Desa dan mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat desa secara berkelanjutan

This community service activity aims to enhance the understanding and capacity of the community in managing Village Owned Enterprises as an instrument for village economic empowerment in Tangkit Baru Village, Sungai Gelam District, Muaro Jambi Regency. The method used is a participatory and persuasive approach through the attention, interest, desire, action model, implemented through stages of initial survey, socialization, participatory discussions, program implementation, mentoring, and evaluation. The results show that prior to the program, Village Owned Enterprises had not been optimally managed due to limited human resources, weak managerial capacity, low understanding of regulations, and minimal utilization of local potential and technology. After the implementation, there was a significant improvement in legal understanding, managerial capacity of Village Owned Enterprises administrators, and community participation in Village Owned Enterprises management. In addition, there was the emergence of local potential based business innovations and increased digital capacity in marketing village products. Overall, this activity demonstrates that integrated socialization and mentoring are effective strategies in strengthening Village Owned Enterprises institutional capacity and promoting sustainable village economic empowerment.



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Fitria. el at (2026). Sosialisasi Peran BUMDes sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.6109>

PENDAHULUAN

Pembangunan desa merupakan bagian penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merata, di mana desa tidak lagi diposisikan sebagai objek, melainkan sebagai subjek pembangunan yang memiliki kewenangan dalam mengelola potensi dan sumber dayanya secara mandiri (Hamza Toatubun, 2025). Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) hadir sebagai salah satu instrumen strategis dalam mendorong kemandirian ekonomi desa melalui pengelolaan potensi lokal yang dimiliki secara kolektif oleh masyarakat desa (Andina Elok et al., 2024). Secara konseptual, BUMDes merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan langsung dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, serta usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

BUMDes memiliki peran penting sebagai penggerak ekonomi desa, khususnya dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, serta mengembangkan usaha berbasis potensi lokal desa. Keberadaan BUMDes juga mampu memberikan nilai tambah terhadap produk desa serta memperluas akses pasar melalui inovasi dan diversifikasi usaha yang berbasis pada kebutuhan masyarakat (Intan Happyana Ari Vidinata, 2025). Implementasi BUMDes di berbagai daerah masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya kapasitas manajerial, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes.

Selain hal di atas kurangnya pemahaman terhadap regulasi serta lemahnya tata kelola kelembagaan juga menjadi faktor penghambat dalam optimalisasi peran BUMDes sebagai penggerak ekonomi desa, kondisi tersebut juga terlihat pada masyarakat di Desa Tangkit Baru, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, di mana peran BUMDes belum berjalan secara optimal akibat keterbatasan kapasitas pengelola serta belum maksimalnya pemanfaatan potensi ekonomi desa. Mayoritas masyarakat di wilayah tersebut bekerja di sektor pertanian, sehingga ketergantungan terhadap sektor ini masih sangat tinggi dan membutuhkan diversifikasi usaha melalui BUMDes untuk meningkatkan nilai ekonomi serta kesejahteraan masyarakat desa.

Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes menunjukkan perlunya pendekatan pemberdayaan yang lebih partisipatif melalui kegiatan edukasi, sosialisasi, dan pendampingan yang berkelanjutan (Hamza Toatubun, 2023). Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui sosialisasi peran BUMDes menjadi sangat penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat desa terhadap fungsi, peran, serta pengelolaan BUMDes yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan ini juga bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan BUMDes, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam pengembangan ekonomi desa secara berkelanjutan (Maria Fatima Coo et al., 2025). Melalui kegiatan sosialisasi ini diharapkan BUMDes di Desa Tangkit Baru dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat desa serta menjadi motor penggerak dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

METODE

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan partisipatif dan persuasif melalui model *attention, interest, desire, action* (AIDA) yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan BUMDes, dimulai dari tahap pemberian pemahaman mengenai pentingnya peran BUMDes sebagai instrumen penguatan ekonomi desa, dilanjutkan dengan membangun ketertarikan terhadap aspek hukum dan manajerial, mendorong partisipasi aktif masyarakat, hingga implementasi penguatan tata kelola BUMDes yang sesuai regulasi (Totok Mardikanto & Poerwoko Soebiato, 2012). Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Tangkit Baru, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi dengan tahapan dimulai dari survei awal dan koordinasi dengan mitra untuk mengidentifikasi permasalahan, kemudian dilanjutkan dengan metode penyuluhan hukum melalui pemberian materi terkait regulasi dan pengelolaan BUMDes, metode diskusi dan tanya jawab untuk mendorong partisipasi aktif serta menggali permasalahan secara langsung, dan metode aksi berupa pemberian contoh praktik baik (*best practice*) pengelolaan BUMDes yang inovatif agar dapat diimplementasikan oleh masyarakat desa.

Partisipasi mitra diwujudkan melalui penyediaan sarana dan prasarana, dukungan data dan informasi, serta keterlibatan aktif dalam pelaksanaan kegiatan, sedangkan evaluasi dilakukan melalui analisis partisipasi, uji pemahaman, serta monitoring keberlanjutan program untuk menilai dampak terhadap peningkatan kapasitas kelembagaan dan kesejahteraan masyarakat desa, sejalan dengan prinsip pengelolaan BUMDes yang profesional, transparan, dan berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes. Serta didukung oleh praktik pengabdian masyarakat berbasis pemberdayaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PPM) ini dilakukan melalui tahapan yang sistematis, dimulai dari analisis kondisi awal, perumusan masalah, pelaksanaan sosialisasi, diskusi partisipatif, implementasi program, hingga pendampingan dan evaluasi. Berdasarkan hasil laporan kemajuan dan laporan akhir, diketahui bahwa kondisi awal BUMDes di Kecamatan Sungai Gelam masih belum optimal, terutama disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya kapasitas manajerial, serta rendahnya pemahaman terhadap regulasi yang mengatur operasional BUMDes. Terdapat pula kendala dalam akses modal, jaringan pemasaran, dan pemanfaatan teknologi juga menjadi faktor penghambat utama dalam pengembangan BUMDes. Hal ini sejalan dengan pendapat Mardikanto yang menegaskan bahwa keberhasilan pemberdayaan masyarakat sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan lokal (Totok Mardikanto & Poerwoko Soebiato, 2012).

Pada tahap analisis kondisi eksisting, hasil menunjukkan bahwa secara sosial BUMDes telah hadir sebagai lembaga ekonomi desa, namun belum sepenuhnya mampu membangun partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan. Partisipasi masyarakat yang masih terbatas ini berdampak pada kurang optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi lokal. Dalam perspektif modal sosial, kondisi ini menunjukkan rendahnya tingkat kepercayaan dan keterlibatan masyarakat terhadap lembaga ekonomi desa. Hal ini sejalan dengan teori Hasbullah yang menyatakan bahwa modal sosial berupa kepercayaan dan jaringan sosial merupakan faktor penting dalam keberhasilan pembangunan berbasis komunitas (Jousairi Hasbullah, 2006).

Dari aspek ekonomi, hasil kegiatan menunjukkan bahwa struktur mata pencaharian masyarakat di Kecamatan Sungai Gelam didominasi oleh sektor pertanian, dengan sekitar 70% masyarakat bekerja sebagai petani sebagaimana ditunjukkan dalam tabel pada laporan. Potensi pertanian tersebut belum sepenuhnya dioptimalkan melalui BUMDes untuk menciptakan nilai tambah ekonomi. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi sumber daya alam dan kemampuan pengelolaan usaha desa. Kondisi ini sejalan dengan konsep pengembangan ekonomi lokal yang menekankan pentingnya inovasi dan pengolahan sumber daya lokal sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat (M. Eko. Yulianto, 2019). Jika pelaksanaan BUMDes dilakukan secara optimalisasi potensi lokal melalui BUMDes dapat meningkatkan pendapatan masyarakat desa (Fahrul Imam Santoso & Ferri Wicaksono, 2025).



Gambar 1. Penyampaian Materi oleh Narasumber Dr. Fitria, S.H., M.H.

Pada aspek kelembagaan, hasil kegiatan menunjukkan bahwa BUMDes telah memiliki struktur organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun belum didukung oleh kapasitas manajerial yang memadai. Permasalahan utama terletak pada pengelolaan keuangan yang belum transparan, perencanaan usaha yang belum berbasis data, serta belum adanya indikator kinerja yang jelas. Hal ini menunjukkan pentingnya penguatan tata kelola organisasi dalam pengembangan BUMDes. Efektivitas organisasi sangat bergantung pada kualitas manajemen dan sistem pengendalian internal (Fitria, 2025), tata kelola yang baik merupakan faktor kunci keberhasilan BUMDes.

Pada aspek hubungan eksternal, hasil kegiatan menunjukkan bahwa BUMDes belum memiliki kemitraan yang kuat dengan pihak eksternal seperti lembaga keuangan, sektor swasta, maupun lembaga pendidikan. Hal ini berdampak pada keterbatasan akses terhadap permodalan, teknologi, dan pasar. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini menekankan pentingnya pengembangan jaringan kemitraan sebagai strategi peningkatan kapasitas BUMDes. Sangat diperlukan kolaborasi antar pemangku kepentingan merupakan faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Pada tahap pelaksanaan sosialisasi, kegiatan difokuskan pada peningkatan pemahaman hukum dan tata kelola BUMDes kepada aparat desa, pengelola, dan masyarakat. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta terkait fungsi, peran, dan regulasi BUMDes, khususnya Undang-Undang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021. Sosialisasi ini juga mendorong kesadaran akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan BUMDes, sebab sosialisasi hukum dapat meningkatkan kapasitas kelembagaan desa.



Gambar 2. Diskusi Bersama Peserta

Pada tahap diskusi partisipatif, masyarakat dan pengelola BUMDes diberikan ruang untuk mengidentifikasi permasalahan dan merumuskan solusi secara bersama. Hasil diskusi menunjukkan bahwa permasalahan utama meliputi keterbatasan pemasaran, kurangnya inovasi produk, serta minimnya pemanfaatan teknologi digital. Diskusi ini menghasilkan rekomendasi strategis seperti pengembangan produk unggulan desa, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan media digital dalam pemasaran. Kerena sangat diperlukan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan agar program lebih berkelanjutan.

Pada tahap implementasi program, kegiatan diarahkan pada pelatihan kewirausahaan, pengembangan produk lokal, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan BUMDes. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan kemampuan pengelola dalam mengidentifikasi peluang usaha dan menyusun strategi pemasaran. Terjadi pula perubahan paradigma dari sekadar produksi menuju orientasi pasar. Harus terdapat inovasi dan kreativitas merupakan kunci utama dalam pengembangan usaha, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. Perbandingan Kondisi Sebelum dan Sesudah Kegiatan

Aspek	Sebelum Kegiatan	Setelah Kegiatan	Indikator
Pemahaman Hukum BUMDes	Pemahaman masyarakat dan pengelola terhadap regulasi BUMDes masih rendah, belum memahami Undang-Undang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021	Terjadi peningkatan pemahaman hukum dan kesadaran terhadap tata kelola BUMDes yang sesuai regulasi.	Meningkatnya kemampuan menjelaskan fungsi, peran, dan aturan BUMDes.
Kapasitas Manajerial	Pengelolaan BUMDes belum profesional, perencanaan usaha dan pelaporan belum optimal.	Pengelola mulai memahami prinsip manajemen usaha, perencanaan, dan pelaporan.	Adanya peningkatan pemahaman manajemen dan tata kelola.
Partisipasi Masyarakat	Partisipasi masyarakat masih rendah dalam pengelolaan dan	Masyarakat mulai terlibat aktif dalam	Meningkatnya keterlibatan dalam

	pengambilan keputusan BUMDes.	diskusi dan kegiatan BUMDes.	forum diskusi dan kegiatan.
Pemanfaatan Potensi Lokal	Potensi pertanian belum diolah menjadi produk bernilai tambah.	Mulai muncul pemahaman tentang diversifikasi usaha dan pengolahan hasil pertanian.	Muncul ide usaha berbasis potensi lokal.
Strategi Pemasaran	Pemasaran masih konvensional dan terbatas pada pasar lokal.	Mulai memanfaatkan media sosial dan strategi pemasaran digital.	Adanya penggunaan media sosial untuk promosi.
Kapasitas Digital	Pengelola belum memahami penggunaan media digital untuk usaha.	Terjadi peningkatan kemampuan pengelolaan media sosial desa melalui pendampingan mahasiswa.	Akun media sosial aktif dan digunakan untuk promosi.
Kemitraan Usaha	Belum memiliki jaringan kemitraan yang kuat dengan pihak eksternal.	Muncul kesadaran pentingnya kemitraan dan mulai dijejaki kerja sama.	Adanya inisiasi jejaring dengan pihak luar.
Tata Kelola (Good Governance)	Transparansi dan akuntabilitas belum optimal.	Pengelola mulai memahami pentingnya transparansi dan akuntabilitas.	Adanya komitmen terhadap tata kelola yang lebih baik.
Peran Mahasiswa	Belum ada keterlibatan langsung mahasiswa dalam pengembangan BUMDes.	Mahasiswa aktif dalam sosialisasi dan pendampingan selama 1 bulan.	Terjadi transfer pengetahuan dan peningkatan kapasitas masyarakat.
Keberlanjutan Program	Belum ada arah pengembangan jangka panjang.	Muncul rekomendasi lanjutan seperti pelatihan, kemitraan, dan digitalisasi.	Adanya rencana tindak lanjut program.

Tabel di atas menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap peningkatan kapasitas kelembagaan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Perubahan yang terjadi tidak hanya pada aspek kognitif (pemahaman), tetapi juga pada aspek perilaku (partisipasi dan praktik pengelolaan BUMDes). Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan sosialisasi dan pendampingan yang dilakukan secara terintegrasi mampu menghasilkan perubahan yang komprehensif. Peningkatan kapasitas digital dan munculnya kesadaran akan pentingnya kemitraan menunjukkan adanya transformasi menuju pengelolaan BUMDes yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman. Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa BUMDes dapat menjadi instrumen strategis dalam pemberdayaan ekonomi desa apabila didukung oleh peningkatan kapasitas sumber daya manusia, tata kelola yang baik, serta pemanfaatan teknologi informasi.

Tahap pendampingan menjadi salah satu tahapan penting dalam kegiatan ini, di mana mahasiswa dilibatkan secara aktif dalam membantu pengelolaan media sosial desa selama satu bulan. Hasil pendampingan menunjukkan peningkatan kapasitas digital BUMDes, khususnya dalam promosi produk dan komunikasi dengan konsumen. Keterlibatan mahasiswa juga memberikan manfaat berupa transfer pengetahuan dan pengalaman kepada masyarakat desa. Hal ini sesuai dengan konsep *experiential learning* yang menekankan pentingnya pembelajaran berbasis pengalaman. Dari perspektif pembangunan berkelanjutan, hasil kegiatan menunjukkan bahwa BUMDes di Kecamatan Sungai Gelam belum sepenuhnya mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam operasionalnya.



Gambar 3. Foto Narasumber dan Peserta

Kegiatan ini juga memberikan pemahaman tentang pentingnya pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, pemberdayaan kelompok rentan, serta perlindungan lingkungan. Hal ini sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang dikemukakan oleh Sachs yang menekankan integrasi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam pembangunan (Jeffrey Sachs & Ki-mun Pan, 2015). Pada tahap evaluasi akhir, kegiatan pengabdian menunjukkan adanya peningkatan dalam pemahaman hukum, kapasitas manajerial, serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes. Masih terdapat tantangan dalam menjaga keberlanjutan program, khususnya terkait konsistensi pengelolaan dan penguatan kapasitas sumber daya manusia. Sangat diperlukan tindak lanjut berupa pelatihan berkelanjutan, penguatan kemitraan, serta dukungan kebijakan dari pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan konsep pembangunan partisipatif yang menekankan pentingnya kolaborasi berkelanjutan antar pemangku kepentingan.

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa pendekatan sosialisasi dan pendampingan yang dilakukan secara terintegrasi mampu meningkatkan kapasitas kelembagaan BUMDes serta mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Hasil ini menegaskan bahwa BUMDes memiliki potensi besar sebagai motor penggerak ekonomi desa, namun memerlukan penguatan berkelanjutan dalam aspek manajemen, sumber daya manusia, dan kemitraan strategis. Keberhasilan BUMDes sangat ditentukan oleh sinergi antara pemerintah desa, masyarakat, dan pihak eksternal.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di Desa Tangkit Baru, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, dapat disimpulkan bahwa peran BUMDes sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat desa masih menghadapi berbagai kendala, terutama pada aspek kapasitas sumber daya manusia, tata kelola kelembagaan, partisipasi masyarakat, serta pemanfaatan potensi lokal dan teknologi, namun melalui kegiatan sosialisasi, diskusi partisipatif, implementasi program, dan pendampingan yang dilakukan secara terintegrasi terbukti mampu meningkatkan pemahaman hukum masyarakat, kapasitas manajerial pengelola, serta keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan BUMDes, sekaligus mendorong munculnya inovasi usaha berbasis potensi lokal dan peningkatan kapasitas digital dalam pemasaran produk desa yang menunjukkan adanya perubahan baik secara kognitif maupun praktis dalam pengelolaan BUMDes sehingga secara umum kegiatan ini menegaskan bahwa pendekatan pemberdayaan berbasis sosialisasi dan pendampingan merupakan strategi yang efektif dalam memperkuat kapasitas kelembagaan BUMDes dan mendorong pengembangan ekonomi desa, oleh karena itu diperlukan tindak lanjut berupa pelatihan berkelanjutan, penguatan kemitraan strategis, serta dukungan kebijakan dari pemerintah daerah guna menjamin keberlanjutan program dan optimalisasi peran BUMDes sebagai motor penggerak ekonomi desa yang mandiri, inovatif, dan berkelanjutan, termasuk melalui penguatan pemanfaatan teknologi digital dan peningkatan partisipasi masyarakat agar mampu beradaptasi dengan dinamika ekonomi modern dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Jambi yang telah memberikan dukungan

pendanaan melalui DIPA-PNBP Fakultas Hukum Skema Pengabdian kepada Masyarakat (PPM) Universitas Jambi Tahun Anggaran 2024 berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Nomor: 571/UN21.11/PM.01.01/SPK/2024 tanggal 14 Juni 2024, sehingga kegiatan pengabdian dengan judul “Sosialisasi Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Memperkuat Perekonomian Desa” dapat terlaksana dengan baik . Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Fakultas Hukum Universitas Jambi, Pemerintah Kecamatan Sungai Gelam, Pemerintah Desa Tangkit Baru, serta seluruh masyarakat dan pengelola BUMDes yang telah berpartisipasi aktif dan mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini.

REFERENSI

- Andina Elok, Puri Maharani, Gumilang Chandra, Shasmita Haningati, & Muhammad Arsyi Dewangga. (2024). Government Policy Strategy in Developing Tourism Villages Through Village-Owned Enterprises. *Mendapo: Journal of Administrative Law*, 5(2), 198–223. <https://doi.org/10.22437/MENDAPO.V5I2.31803>
- Fahrul Imam Santoso, & Ferri Wicaksono. (2025). Optimalisasi Pemasaran Produk Melalui Pengelolaan Website Pada Bumdes Tunas Mandiri Nlanggeran Gunungkidul. *Jurnal Abdi Insani*, 12(9), 4879–4887. <https://doi.org/10.29303/ABDIINSANI.V12I9.2691>
- Fitria. (2025). *Pengembalian Kerugian Negara Akibat Penyalahgunaan Wewenang*. Damera Press.
- Hamza Toatubun. (2023). Sosialisasi Meningkatkan Pembangunan Kesejahteraan Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Warsa Biak Utara. *Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum*, 1(2), 102–111. <https://doi.org/10.46924/LEGALEMPOWERMENT.V1I2.199>
- Hamza Toatubun. (2025). Sosialisasi Meningkatkan Pembangunan Kesejahteraan Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Warsa Biak Utara. *Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum*, 1(2). <https://doi.org/10.46924/legalempowerment.v1i2.199>
- Intan Happyana Ari Vidinata. (2025). Inovasi Pengelolaan BUMDes Welirang Dalam Membangun Desa Wisata Ketapanrame Secara Berkelanjutan. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 9(2), 96–108. <https://doi.org/10.31955/MEA.V9I2.5660>
- Jeffrey Sachs, & Ki-mun Pan. (2015). *The Age of Sustainable Development*. Columbia University Press.
- Jousairi Hasbullah. (2006). *Social Capital: Menuju Keunggulan Budaya Manusia Indonesia*. MR-United Press.
- M. Eko. Yulianto. (2019). *BUMDesa pilar kekuatan Indonesia : bunga rampai pemikiran & praktik pembangunan desa*. Prasetiya Mulya Publishing.
- Maria Fatima Co, Emanuel Kosat, & Eusabius Saperera Niron Niron. (2025). Revitalisasi Peran BUMDes Berbasis Partisipasi Komunitas: Model Capacity Building Menuju Ekonomi Desa Berkelanjutan di Kabupaten Nagekeo. *Jurnal Abdimas Prakasa Dakara*, 5(2), 84–95. <https://doi.org/10.37640/JAPD.V5I2.2446>
- Totok Mardikanto, & Poerwoko Soebiato. (2012). *Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik*. Alfabeta.